

# STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Zaili Rusli\*

**Abstraction:** One of the purpose of area autonomy is to quicken development of area through program the destructing of poorness. But the problem of *poverty* in this time is still identically with limitation of society to access in development. This research aim to know program strategy emeroment poor society in Kabupaten Kuantan Sengingi. Do program strategy emeroment poor society have given to access which enough wide in development. Population is poor society family head which have child of balita, school age of base, and continuation school of. Intake of sampel use technique of proposional sampling according to chosen countryside. Technics of collecting data by interview with responder and key informan. Data analysis have the character of descriptive is qualitative supported by data of secunder. Result of research indicate that strategy emeroment poor society with approach of economics not yet given satisfying result for the destructing of *poverty* of cause problems of *poverty* not merely economic *poverty* but also social *poverty* or structural *poverty*.

**Keywords:** *Strategic of Society environment, Economic poverty, Struktural poverty, Economic development.*

Persoalan kemiskinan sampai saat ini masih menjadi problem bangsa pada umumnya dan daerah pada khususnya, karena kemiskinan identik dengan keterbatasan masyarakat untuk bisa akses dalam pembangunan. Otonomi daerah pada prinsipnya ditujukan untuk percepatan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, namun demikian + 10 tahun otonomi daerah bergulir masalah kemiskinan belum kunjung terpisahkan dari kehidupan. Kenyataan ini ditunjang oleh berbagai program pengentasan kemiskinan yang belum terealisasikan sesuai tujuan dan sasaran.

Secara umum kondisi masyarakat di Indonesia berdasarkan data dari BPS, (2000 : 27-28), dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan BPS jumlah penduduk miskin sebesar 38,4 juta orang atau 18,20% dari jumlah penduduk.
2. Angka kematian bayi sebanyak 47 per 1000 kelahiran angka harapan hidup laki-laki 63,45 tahun dan perempuan 67,3 tahun.
3. Angka partisipasi sekolah anak usia 7-12 tahun sebesar 96,10% usia 13-15 tahun sebesar

79,21%, usia 19-24 tahun sebesar 11,62% *drop out* sekolah anak usia kurang dari 15 tahun sebesar 2,96%.

4. Jumlah balita kurang gizi sebesar 10,36%.
5. Jumlah penduduk cacat 1,4 juta, fakir miskin 15,5 juta, anak terlantar sebanyak 3,1 juta.
6. Pengangguran terbuka 8,10% dari jumlah penduduk usia 15 tahun keatas (sekitar 40 juta orang) (Paparasi Menko Kesra: 2003)

Terlepas dari kondisi makro ekonomi Indonesia dan makro ekonomi global, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Balitbang Pemprov Riau, 2004: Tak ada halaman ) memaparkan bahwa penyebab kemiskinan adalah karena :

1. Ketidakadilan memperoleh akses di bidang permodalan, pendidikan, kesehatan, pangan, dan infrastruktur serta peluang usaha dan peluang kerja yang berakibat kegagalan terhadap kepemilikan tanah dan modal.
2. Ketidakadilan pertumbuhan dalam strata ekonomi, antardaerah dan antarsektor.
3. Terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana.

\*Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru, 28293. Telp. 0761-63277, 35675

4. Kerentanan dan ketidakmampuan menghadapi goncangan karena krisis ekonomi, kegagalan panen, PHK, konflik sosial politik, korban kekerasan sosial dan rumah tangga, bencana alam, musibah.
5. Tidak adanya suara yang mewakili dan ketidakberdayaan di dalam institusi negara dan masyarakat karena tidak ada kepastian hukum, kebijakan publik yang tidak mendukung upaya penanggulangan kemiskinan serta rendahnya posisi tawar masyarakat miskin.
6. Kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor.
7. Adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung.
8. Adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antar sektor ekonomi tradisional versus ekonomi modern.
9. Rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat.
10. Budaya hidup dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumberdaya alam dan lingkungannya.
11. Tidak terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan baik (*good government*).
12. Pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan.

Bila disimak data di atas maka dapat digambarkan bahwa perspektif yang dilihat sebagai problema kemiskinan adalah persoalan-persoalan fisik dan angka-angka pada tingkat makro, tidak ada penjelasan yang signifikan, mengapa proses tersebut terjadi, apa kendala-kendala yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, mengapa program-program pengentasan kemiskinan kurang berjalan secara efektif.

Sampai saat ini usaha untuk merancang program dan melakukan langkah pemberdayaan masyarakat miskin secara nyata masih menemui berbagai kendala, di antaranya adalah ketidaktersediaan data yang memadai yang dapat mendukung operasionalisasi usaha tersebut. Di sisi lain data penduduk miskin yang dipublikasikan oleh berbagai dinas atau Instansi sering sangat beragam, baik dalam jumlah, konsep maupun parameter yang mendasari.

Sejumlah kekeliruan yang dilakukan di masa lalu hingga menyebabkan berbagai upaya penanganan kemiskinan tidak berjalan efektif adalah sebagai berikut. *Pertama*, kurang memperhatikan dimensi sosial lain yang penting karena pemahaman bahwa kemiskinan sebagai persoalan ekonomi. *Kedua*, ketersediaan data tentang jumlah penduduk dan keluarga miskin yang kurang akurat dan kurang representatif, sehingga tidak banyak bermanfaat untuk kepentingan perencanaan program pembangunan yang efektif. *Ketiga*, data kemiskinan yang disediakan seringkali bersifat statis, hanya menunjukkan berapa jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan, sebaliknya kurang menggali dinamika kehidupan serta kemampuan penduduk atau keluarga miskin itu sendiri dalam mengakses berbagai fasilitas publik yang layak.

Secara faktual, yang disebut kemiskinan sendiri sebetulnya memiliki wujud yang majemuk, termasuk rendahnya tingkat pendapatan dan sumber daya produktif keterbatasan akses kepada pendidikan dan kematian akibat penyakit yang terus meningkat, tempat tinggal yang tidak memadai, lingkungan yang tidak aman, serta diskriminasi dan keterasingan sosial.

Kemiskinan juga dicirikan oleh rendahnya tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan dalam kehidupan sipil, sosial dan budaya (*World Summit for Social Development, 1995* : tanpa halaman). Jadi, kecenderungan mereduksi pengertian kemiskinan hanya sebagai persoalan ekonomi atau besar pendapatan dikurangi pengeluaran dan sesungguhnya tidak pernah bersifat kontekstual, bahkan sebagian bersifat kontra-produktif. Hal yang sama juga di alami oleh Pemerintah Kabupaten Singingi.

Dalam rangka memetakan kondisi kemiskinan yang lebih akurat, pemerintah daerah kabupaten Kuantan Singingi menyusun dan memetakan data kemiskinan di kabupaten untuk memberikan gambaran yang lebih realistis tentang kondisi kemiskinan.

Dari segi perencanaan, pendataan dan pemetaan keluarga miskin memberikan suatu indikasi yang sangat bermanfaat mengenai perkembangan kemiskinan manusia antar waktu, sehingga dapat di jadikan acuan yang lebih akurat dalam proses penyusunan program intervensi. Pemerintah Kabupaten

Kuantan Singingi telah penyusunan Strategi pemberdayaan masyarakat miskin karena memasuki tahun 2008 diprediksi berbagai persoalan yang harus dihadapi akan makin berat, sementara dana yang tersedia amat terbatas, sehingga pemberdayaan masyarakat miskin membutuhkan perencanaan yang lebih akurat dan efektif oleh karena itu masalah penelitian ini di fokuskan faktor apakah penyebab kemiskinan masyarakat dan bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat miskin yang tepat sesuai karakteristik kehidupan mereka, beranjak dari permasalahan tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kemiskinan masyarakat dan merumuskan strategi pemberdayaan masyarakat miskin di kabupaten Kuantan Singingi

Untuk mengkaji masalah kemiskinan perlu ditampilkan konsep tentang kemiskinan Levitan (1980 : 73) mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Sedangkan Schiller (1979 : 113), kemiskinan adalah ketidaksanggupan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas.

Friedman (1979 : 81) berpendapat, kemiskinan adalah ketidaksamaan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Sementara yang dimaksud basis kekuasaan sosial itu menurut Friedman meliputi : Pertama, modal produktif atas asset, misalnya tanah perumahan, peralatan, dan kesehatan. Kedua, sumber keuangan, seperti pendapatan dan kredit yang memadai. Ketiga, organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, seperti koperasi. *Keempat, network* atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang, pengetahuan dan ketrampilan yang memadai. Kelima, informasi-informasi yang berguna untuk kehidupan.

Menurut akar penyebab yang melatarbelakangkannya, secara teoritis kemiskinan dibedakan menjadi dua kategori. *Pertama*, kemiskinan alamiah, yakni kemiskinan yang timbul sebagai akibat sumber-sumber daya yang langka jumlahnya dan atau karena tingkat perkembangan teknologi yang sangat rendah. Artinya faktor-faktor yang menyebabkan suatu masyarakat menjadi miskin adalah secara alami

memang ada, dan bukan bahwa akan ada kelompok atau individu di dalam masyarakat tersebut yang lebih miskin dari yang lain. Mungkin saja dalam keadaan kemiskinan alamiah tersebut akan terdapat perbedaan-perbedaan kekayaan, tetapi dampak perbedaan tersebut akan diperlunak atau dieliminasi oleh adanya pranata-pranata tradisional, seperti pola hubungan *patron-client*, jiwa gotongroyong, dan sejenisnya yang fungsional untuk meredam kemungkinan timbulnya kecemburuan sosial.

*Kedua*, kemiskinan struktural, yakni kemiskinan yang terjadi karena struktur sosial yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata. dengan demikian sebagian anggota masyarakat tetap miskin walaupun sebenarnya jumlah total produksi yang dihasilkan oleh masyarakat tersebut bila dibagi rata dapat membebaskan semua anggota masyarakat dari kemiskinan.

Kemiskinan struktural dalam banyak hal terjadi bukan karena seorang individu atau anggota keluarga malas bekerja atau karena mereka terus-menerus sakit. Berbeda dengan perspektif modernisasi yang cenderung memvonis kemiskinan bersumber dari lemahnya etos kerja, tidak dimilikinya etika wirausaha atau karena budaya yang tidak terbiasa dengan kerja keras. Menurut Selo Soemardjan (1980 : 34), yang dimaksud dengan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat, karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.

Secara teoritis, kemiskinan struktural dapat diartikan sebagai suasana kemiskinan yang dialami oleh suatu masyarakat yang penyebab utamanya bersumber, dan oleh karena itu dapat dicari pada struktur sosial yang berlaku adalah sedemikian rupa keadaannya sehingga mereka yang termasuk ke dalam golongan miskin tampak tidak berdaya untuk mengubah nasibnya dan tidak mampu memperbaiki hidupnya. Struktur sosial yang berlaku telah mengurung mereka ke dalam suasana kemiskinan secara turun-temurun selama bertahun-tahun. Sejalan dengan itu, mereka hanya mungkin keluar dari penjara kemelaratan melalui suatu proses perubahan struktur yang mendasar.

Kemiskinan struktural, biasanya terjadi di dalam suatu masyarakat di mana terdapat jurang yang tajam antara mereka yang hidup melarat dengan mereka yang hidup dalam kemewahan dan kaya raya. Mereka itu, walaupun merupakan mayoritas terbesar dari masyarakat, dalam realita tidak mempunyai kekuatan apa-apa untuk mampu memperbaiki nasib hidupnya. Sedangkan minoritas kecil masyarakat yang kaya raya biasanya berhasil memonopoli dan mengontrol berbagai kehidupan, terutama segi ekonomi dan politik.

Definisi dan pengertian kemiskinan yang lebih lengkap dalam arti sesuai dengan kenyataan dan secara konseptual jelas dikemukakan oleh Robert Chambers (1987 : 63). Bahwa inti dari masalah kemiskinan sebenarnya terletak pada apa yang disebut *deprivation trap* atau perangkap kemiskinan. Secara rinci, *deprivation trap* terdiri dari lima unsur, yaitu: (1) kemiskinan itu sendiri, (2) kelemahan fisik, (3) keterasingan atau kadar isolasi, (4) kerentanan, dan (5) ketidakberdayaan. Kelima unsur ini seringkali sating berkait satu dengan yang lain sehingga merupakan perangkap kemiskinan yang benar-benar berbahaya dan mematikan peluang hidup orang atau keluarga miskin.

Strategi penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat intinya adalah pemberdayaan masyarakat yaitu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peran serta aktif masyarakat itu sendiri dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan hidup, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi, serta memperkuat martabat manusia dan bangsa. Strategi ini, di tingkat nasional diarahkan untuk menurunkan populasi penduduk miskin dari sekitar 18,95% (atau sekitar 37,3 juta jiwa) di tahun 2001 menjadi sekitar 14% (atau sekitar 26,8 juts jiwa) di akhir tahun 2004. Strategi pemberdayaan masyarakat di laksanakan melalui dua kegiatan pokok:

1. Upaya pengurangan pengeluaran masyarakat miskin dalam mengakses kebutuhan dasar, seperti: pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang mempermudah dan mendukung kegiatan sosial ekonomi,
2. Upaya peningkatan produktivitas masyarakat miskin, yang mana masyarakat miskin memperoleh peluang, kemampuan pengelolaan, dan

perlindungan untuk memperoleh hasil yang lebih baik dalam berbagai kegiatan ekonomi, sosial budaya, maupun politik. Pada tingkat pelaksanaan, program pengentasan kemiskinan pada dasarnya bertujuan untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Secara garis besar, cakupan dari program penanggulangan kemiskinan yang dikembangkan adalah:

- a. Pemberdayaan dan pengembangan kemampuan manusia yang berkaitan dengan aspek pendidikan, kesehatan, dan perbaikan kebutuhan dasar tertentu lainnya,
- b. Pemberdayaan dan pengembangan kemampuan manusia berkaitan dengan perbaikan aspek lingkungan, permukiman, perumahan, dan prasarana pendukungnya,
- c. Pemberdayaan dan pengembangan kemampuan manusia yang berkaitan dengan aspek usaha, lapangan kerja, dan lain-lain yang dapat meningkatkan pendapatan.

Untuk menyusun strategi penanggulangan kemiskinan yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ada dua hal pokok yang harus dikerjakan: Pertama, melakukan penyesuaian kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan untuk tahun 2003 dan 2004, dan Kedua, melakukan penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan untuk jangka panjang (Menkokesra, 2003 : tanpa halaman).

## METODE

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, karena akan menguraikan gambaran data dan peta kemiskinan masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi. Populasi dalam penelitian ini adalah keluarga yang mempunyai anggota keluarga yang rentan terhadap perubahan sosial ekonomi yaitu dua di antara kriteria berikut; mempunyai balita, mempunyai anak usia sekolah SD atau SLTP dan yang mempunyai balita.

Sampel penelitian adalah keluarga yang mempunyai kriteria sampel, yang diambil secara proporsional di dua desa atau kelurahan yang mewakili tiap kecamatan. desa/kelurahan yang dipilih adalah desa atau Kelurahan yang bercirikan urban dan ru-

ral. Bila kondisi desa atau kelurahan di suatu kecamatan dianggap homogen maka diambil satu desa/ kelurahan untuk sampel desa. Responden adalah kepala keluarga atau anggota keluarga yang bisa mewakili kepala keluarga.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui survei terhadap responden di beberapa desa atau kelurahan di seluruh kecamatan dengan menggunakan kuesioner terstruktur.

Data sekunder diperoleh dari BPS Kabupaten Kuantan Singingi, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Badan Pemberdayaan Masyarakat desa, Dinas Pendidikan, Bappeda Kabupaten Kuantan Singingi. Analisis data dilakukan; 1) Mengkaji dan menganalisis data sekunder mengenai indikator kemiskinan, besaran kemiskinan dan kondisi demografis penduduk miskin Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya. Uraian tentang kondisi umum Kuantan Singingi ini penting untuk mengetahui peta makro permasalahan kemiskinan; 2) Melakukan review terhadap hasil studi mengenai masyarakat miskin di Kabupaten Kuantan Singingi dan efektivitas pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya; 3) Melakukan penggalian data primer ke lapangan untuk memperoleh gambaran yang akurat mengenai kondisi dan berbagai tekanan yang dihadapi masyarakat miskin di Kabupaten Kuantan Singingi. Data primer, ini digali dari keluarga-keluarga miskin itu sendiri sebagai kelompok sasaran program pengentasan kemiskinan dan aparat pelaksana program pengentasan kemiskinan dari dinas terkait. 4) Melakukan kajian tentang mekanisme kerja dan kendala yang dihadapi birokrasi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam proses pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dengan melakukan *indepth interview* dengan aparat Pemkab. Dinas-dinas terkait yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Kuantan Singingi dan para pakar untuk kepentingan konfirmasi dan identifikasi prioritas permasalahan kemiskinan yang dihadapi untuk kemudian di jadikan bahan acuan dalam merumuskan program aksi untuk mempercepat proses pengentasan masyarakat miskin di Kabupaten Kuantan Singingi.

## HASIL

Berdasarkan pembagian wilayah kajian yang dibagi menjadi 4 wilayah kajian, dimana wilayah I yang merupakan kawasan hilir dari sungai kuantan yang terdiri dari Kecamatan Kuantan hilir, Cerenti, Inuman, Pangean dan Kecamatan Logas Tanah Darat. Dalam wilayah kecamatan ini merupakan desa-desa penduduk lokal dan cukup banyak penduduk desa yang masih berusaha di bidang perkebunan karet tradisional.

Pada wilayah I ini jumlah persentase penduduk miskin cukup tinggi. Demikian juga wilayah kajian III yang terdiri dari Kecamatan Kuantan Mudik, Hulu Kuantan dan Kecamatan Gunung Toar. Hampir sama dengan wilayah kajian I, dimana penduduk pada wilayah kajian III didominasi oleh penduduk lokal. Dilihat struktur pendidikan penduduk minimal wilayah studi maka wilayah studi I dan III dilihat sebagai penduduk miskin yang tidak sekolah juga dijumpai persentase yang cukup tinggi dibanding wilayah studi II dan IV. Demikian juga jelas jumlah persentase penduduk yang tidak bekerja di daerah tersebut di wilayah I dijumpai sebanyak 21,20% dan wilayah sedang III dijumpai sebanyak 7,25%. Sedangkan pada wilayah studi II dijumpai sebanyak 3,16% dan wilayah studi IV dijumpai sebanyak 3,26% penduduk miskin yang tidak bekerja.

Berdasarkan jumlah persentase penduduk miskin maka faktor penyebab kemiskinan untuk masing-masing wilayah studi menurut kecamatan adalah berbeda.

Untuk wilayah studi I yang terdiri dari Kecamatan Cerenti, Inuman, Pangean, Kuantan Hilir dan Kecamatan Inuman disebabkan oleh faktor-faktor material seperti lapangan kerja, permodalan untuk pembukaan lahan perkebunan. Keterisolasian daerah juga disebabkan oleh faktor kultural seperti pendidikan, pengetahuan untuk dapat menciptakan lapangan kerja dengan pengetahuan untuk mencari sumber-sumber permodalan.

Sedangkan untuk wilayah kajian II dan wilayah kajian IV yang terdiri dari Kecamatan Kuantan Tengah, Singingi dan Singingi Hilir penduduk miskin relatif sedikit dibanding wilayah kajian I dan III. Maka berdasarkan kondisi wilayah, tingkat

pendidikan dan jumlah pertambahan penduduk miskin faktor utama menjadi penyebab kemiskinan lebih banyak bersifat ekonomis. Untuk wilayah kajian III yang terdiri dari Kecamatan Kuantan Mudik, Hilir Kuantan dan Kecamatan Gunung Toar faktor penyebab utama kemiskinan adalah faktor kultural seperti pendidikan, dan kemampuan mencari bantuan modal usaha.

### Faktor Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan pada masyarakat kabupaten Kuantan Singingi terutama masyarakat petani disebabkan oleh faktor-faktor yang kompleks. Faktor-faktor tersebut tidak hanya alamiah tapi juga struktural. Faktor alamiah diantaranya menyangkut kondisi tanah dan sistem pengairan. Faktor lainnya adalah keterbatasan sumber daya, modal, dan akses jaringan perdagangan. Kesulitan untuk beranjak kondisi ini menyebabkan mereka banyak yang patah arang, kaum muda banyak yang menjadi penganggur. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yang selalu dihadapi oleh keluarga atau rumah tangga petani miskin adalah bagaimana individu anggota keluarga yang ada didalamnya dapat tetap survive.

Setiap anggota keluarga harus memiliki kemampuan untuk mencari nafkah, berapapun kecilnya perolehan nafkah itu. Setiap anggota keluarga produktif juga harus memiliki kepedulian terhadap kelangsungan hidup rumah tangga diatas kepentingan pribadi. Dengan begitu setiap anggota rumah tangga produktif bisa memperoleh penghasilan yang berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup bersama. Hasil wawancara mendalam dengan beberapa responden kunci menunjukkan gambaran kepasrahan mereka. Hasil wawancara dengan Bapak Hasanudin di Kecamatan Benai.

*"...bagaimana lagi pak, bagi kami keluarga tidak mampu untuk bisa menyekolahkan anak ke tingkat lanjut, mahal biaya sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari sering kekurangan. Mungkin karena sekolahnya tidak tinggi jadi tidak memiliki keterampilan lain yang menunjang untuk kerja lain tempat yang lebih menjanjikan. Tidak seperti saya sekarang ini yang buruh tani. Saya juga tidak pengen anak saya jadi buruh tani seperti saya, tetapi mau*

*bagaimana lagi.. akhirnya anak saya membantu saya sebagai buruh tani... "*

Berbagai masalah yang sama tapi berbeda alasan banyak dilontarkan responden lain. Bapak Rahim di Kecamatan Kuantan Mudik dan Ibu Ana di kecamatan yang sama

*"...sebenarnya anak saya sudah tamat SMU, tetapi anak saya itu merasa ragu untuk mencari pekerjaan lain karena merasa tidak memiliki keterampilan. Saat ini juga masih bingung mau kerja apa, dan saat ini mencari pekerjaan lain selain bertani juga susah pak... "*

Keinginan anak untuk ikut orang tua terus juga menjadi kendala untuk anak menjadi mandiri. Pengaruh teman sebaya juga menjadi hal yang cukup dominan, dimana anak malas untuk melanjutkan sekolah dan inginnya santai dan bermalasan-malasan seperti yang dikeluhkan oleh Bapak Ridwan di Kecamatan kuantan Hilir

Dari beberapa diversifikasi pekerjaan lain yang paling mungkin untuk ditekuni bagi yang masih muda adalah menjadi sopir. Itupun tidak murah karena harus memiliki Surat Ijin Mengemudi dan juga modal. Beberapa responden juga harus merawat dan menghidupi orang tuanya yang sudah lanjut usia. Perempuan usia produktif lebih banyak memilih bertani dengan irigasi yang, memadai.

Jumlah peluang kerja sangat ditentukan oleh potensi sumber daya ekonomi yang tersedia. Desa yang memiliki lahan pertanian subur maka pekerjaan selain bertani dan berkebun sangatlah terbatas. Hampir seluruh responden menginginkan anggota keluarganya untuk segera bekerja.

Usulan kepada pemerintah merupakan harapan terakhir masyarakat untuk bisa membantu anggota keluarganya yang menganggur. Seperti yang diusulkan oleh Bapak Mius di Kecamatan Benai

*"...kalau memang kondisinya sudah seperti ini, peluang pekerjaan lain hampir tidak ada, dan lahan pertanian yang semakin sempit. Maka sebaiknya pemerintah membantu kita secara langsung dengan membangun kebun-kebun sawit. Atau anak kita yang muda-muda ini diberi pelatihan untuk punya keterampilan. Atau pemerintah bisa menyekolahkan anak kami biar tidak menjadi pengangguran..."*

Pekerjaan yang hingga saat ini menjadi kebanggaan adalah bila menjadi seorang Pegawai Negeri meskipun itu hanya tingkat desa. Dibandingkan dengan pekerjaan yang lain, untuk kepentingan jangka panjang, menjadi pegawai negeri adalah pekerjaan yang paling aman, seperti yang diungkapkan oleh beberapa responden.

Dari data temuan lapangan, bahwa untuk menuju arah pembangunan masyarakat yang berbasis pemberdayaan, sangat jauh dari apa yang diharapkan. Upaya yang pernah dilakukan masyarakat untuk mencari pekerjaan bagi yang masih pengangguran sangat sedikit sekali dilakukan.

*"...selama ini belum ada upaya untuk mencari pekerjaan yang lebih bagus, hanya kerja sementara dan tidak tetap saja apa yang bisa dikerjakan. Dan dari pekerjaan yang pernah dilakukan hanya mengandalkan kerja tenaga saja. Tidak lain tidak bukan hanya buruh di kebun sawit perusahaan... "(Abdullah Jafar di Kecamatan Singingi Hilir)"*

Proses dalam pencarian informasi dalam mencari pekerjaan bagi yang masih pengangguran hanya terbatas pada kontak keluarga saja. Bahkan kontak keluarga yang telah dihubungi pun belum tentu bisa untuk memberikan pekerjaan.

*"...seringkali kita ini untuk menitipkan anak kami kepada keluarga besar kami untuk bisa bekerja, tetapi jika tidak ada pekerjaan biasanya ya disuruh-suruh saja membantu seadanya di ladang..." (Masud di Kecamatan Benai) "... bahkan terkadang ikut mobil, barangkali nanti bisa sambil belajar, jika ada modalan enak nantinya..." (Armain Kecamatan. Benai)"*

### **Strategi Pemberdayaan Masyarakat Miskin**

Dari hasil temuan lapangan, kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi disebabkan oleh faktor alamiah dan struktural. Dengan demikian kebijakan untuk mengentaskannya harus mencakup kedua penyebab tersebut.

Kemiskinan alamiah yang terjadi pada masyarakat, diatasi dengan memberikan modal untuk mengembangkan kreatifitas dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka atau dengan kata lain "pendeka-

tan modal" lebih utama. Namun demikian, kalau tidak dilakukan dengan pembinaan dan pengawasan yang tepat, maka pendekatan modal tersebut sangatlah rawan akan kegagalan. Praktik dilapangan seperti yang dikatakan Bapak Zulman salah seorang aparat Desa Kecamatan Kuantan Mudik; masyarakat kata pak Zulman harus berhadapan dengan kemiskinan itu sendiri yang sudah berurat berakar.

*"...bahwa program dana bergulir dahulu ada di Inpres Desa Tertinggal itu dan dibentuk PokMas-PokMas. sekrang dana itu mati dan berakhir pada pengguna dana itu. Kegagalan dari program bantuan berupa bantuan uang (modal) itu karena beberapa dari masyarakat tidak memiliki mental usaha ditambah dengan kondisi pendidikan (sumber daya) masyarakat yang rendah sehingga kurang tahu banyak akan informasi untuk mengembangkan usaha yang lain. Tetapi ada keputusan Bupati untuk menarik dana itu kembali dari masyarakat untuk dijadikan Lembaga Perkreditan Desa dengan sistem dan model yang baru yang sepenuhnya dilakukan dan rekomendasi oleh kelompok masyarakat sendiri dan diawasi oleh BPM dan LPPM, semoga bisa menjadi lebih baik..."*

Ketika modal diterima masyarakat secara langsung belum berarti bisa sebanding lurus untuk pengembangan usaha lain, dalam pengentasan kemiskinan tanpa memperhatikan faktor yang lain. Karena bantuan dana segar kemungkinan besar akan disalahgunakan untuk komsumtif.

*"...untuk perekonomian dari hasil pertanian saja tidak cukup untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, jadinya kalau dapat bantuan biasanya dipakai menutup membeli kebutuhan tangga dan tidak ada bakat untuk bikin usaha tambahan..." (Maimah, Kecamatan Kuantan Tengah)*

Selain berkaitan erat dengan tingkat Pendidikan masyarakat, juga sarana infrastruktur yang terbatas, juga biaya transportasi yang kurang terjangkau masyarakat. Untuk menjual hasil pertanian dan perkebunan harganya sangat rendah karena besarnya biaya transportasi menuju ke kota dan ke pasar.

Kemiskinan karena ketidakberdayaan masyarakat akan posisi tawar mereka akan kelas-kelas sosial di atasnya. Posisi tawar yang mungkin bisa di

jadikan contoh adalah masalah kebijakan harga dasar makanan (kebutuhan) pokok. Masyarakat tidak bisa menentukan berapa harga dasar hasil pertaniannya. Fenomena tengkulak atau ijon juga masih melekat di para petani. Selain, agar bisa menjual hasil produksi cepat, tengkulak atau ijon menjadi pilihan utama masyarakat untuk mendapatkan uang cepat dengan menjual padinya sebelum masa panen. Seperti dikatakan pak Maspar di Kecamatan Hulu Kuantan.

*"...jika ada anggota keluarga yang sakit mendadak dan butuh biaya pengobatan maka tidak ada jalan lain istilahnya 'padi cari uang' ya ke tengkulak itu, penghasilan kami memang tidak bisa cukup kalau tidak pinjam uang untuk hal-hal yang mendadak..."*

Selain hal yang di atas, faktor alam juga sangat mempengaruhi hasil pendapatan masyarakat. Sistem pertanian yang menggunakan tadah hujan dimana dalam setahun hanya bisa panen satu kali dan sisa bulannya dipakai untuk perkebunan. Beda dengan sawah yang menggunakan sistem irigasi, dimana dalam setahun bisa dipanen 2 kali hingga 3 kali. Tanaman Kopi, Vanili, dan Kemiri sangat membantu dalam menutupi kebutuhan hidup sehari-hari meskipun harga jual tidak bisa diprediksi, malah terkadang dikonsumsi sendiri. Menjadi beban lebih berat ketika jumlah anaknya cukup banyak, Sangat berbahaya ketika tenaga produktif yang ada juga menderita sakit.

*"...kalau makannya pas-pasan dan terkadang seadanya juga susah untuk memenuhi gizi umumnya, ya memang kadang pernah sakit kalau kepenatan..."* Bapak Musro di Kecamatan Singingi Hilir

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk menanggulangi dan menghapus kemiskinan telah disusun dan dilaksanakan di lapangan, seperti terus memacu peningkatan kualitas pelayanan dasar dan perlindungan sosial, memacu kualitas sarana dan prasarana wilayah, menyediakan fasilitas kredit bagi masyarakat miskin melalui PPK, juga membangun perkebunan sawit baru.

Namun, upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan hingga kini masih belum membuahkan hasil yang memuaskan. Masih banyak penduduk

Kuantan Singingi, baik di desa maupun di kota belum tersentuh program penanggulangan kemiskinan. Kendati jumlah orang miskin menurun, namun kesenjangan dalam banyak hal justru semakin lebar.

## PEMBAHASAN

Kebijakan pembangunan pedesaan dengan program pemberdayaan masyarakat miskin belum menunjukkan hasil memuaskan karena program tersebut lebih bersifat bantuan materil. Padahal konsep kemiskinan bukan hanya dipahami dari dimensi ekonomi tetapi kemiskinan itu sendiri sebetulnya memiliki wujud yang majemuk. Selain faktor ekonomi seperti tingkat pendapatan, sumberdaya produktif, juga menyangkut faktor sosial seperti akses meningkatkan pendidikan, peluang dan ruang gerak untuk memerdayakan diri sendiri dalam masyarakat. Salah satu aspek sosial yang menghambat pemberdayaan masyarakat miskin adalah masih kuatnya pengaruh ikatan *patron klien*. Bentuk *patron* ini adalah berupa tengkulak-tengkulak dengan sistem ijon, dimana masyarakat petani menjual hasil panen padinya sebelum panen dengan harga lebih murah sehingga posisi tawar mereka berada pada tingkat yang paling lemah. *Patron klien* ini eksistensinya sudah lama di masyarakat dan sampai saat ini ikatan *patron klien* masih ada. Hanya saja dalam praktiknya, bentuknya lebih halus dan dibungkus dalam perjanjian dan aturan yang formal (Suprpto, et al, 2003: 265). Ikatan *patron klien* sebagai bentuk hubungan antar manusia dan antar kelompok manusia yang bersifat sosial kultural, dalam kenyataannya tak terlepas dari kepentingan ekonomi politik. Melalui perlindungan yang di berikan pada *klien patron* berharap mendapatkan dukungan ekonomi dan politik secara langsung. Bila tidak mendapatkan apa-apa yang bersifat ekonomi politik, maka *patron* tidak akan memberikan perlindungan. Oleh karena hubungan *patron* itu bersifat vertikal antara seseorang atau pihak yang mempunyai kedudukan sosial politik dan ekonomi yang lebih tinggi dengan seseorang atau kelompok orang yang kedudukan sosial, politik dan ekonominya lebih rendah.

Dari aspek ekonomi pemberdayaan masyarakat miskin dengan pemberian bantuan modal ternyata belum efektif. Hal ini disebabkan kurangnya

pembinaan terhadap penerima bantuan dalam pengelolaan modal usahanya dan kurangnya pengawasan oleh pihak organisasi pelaksana.

Hasil penelitian Hasim As'ari (2007 : 114) tentang efektifitas bantuan langsung tunai untuk pengentasan kemiskinan di Kecamatan Tenayan Pekanbaru, ternyata juga kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh faktor penentu kebijakan dan faktor pelaksana. Jadi pembangunan ekonomi kerakyatan dengan program pemberdayaan masyarakat perlu adanya kerjasama dan partisipasi dari pihak yang terkait dengan program tersebut. Sehubungan dengan itu menurut Antonius Tarigan (2003 : 8) langkah yang harus ditempuh antara lain adalah, 1). Reposisi peran dari masing-masing *stakeholders*. Terutama perubahan peran pemerintah dari regulator menjadi fasilitator pengembangan ekonomi dengan mengeluarkan kebijakan yang kondusif, 2). Membentuk koalisi antar semua pelaku pembangunan dalam bentuk pola kemitraan, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat dapat memberi input yang riil bagi jalan pembangunan ekonomi daerah sesuai dengan kapasitas yang dimiliki, 3). Pembangunan modal sosial yang ada dalam masyarakat daerah seperti semangat gotong royong, kekeluargaan dan ikatan kebersamaan

Namun demikian arah dan kebijakan umum penanggulangan kemiskinan yang direkomendasikan untuk dikembangkan di Kabupaten Kuantan Singingi adalah, dengan 1). Mempertajam fokus kelompok sasaran program pemberdayaan masyarakat miskin. Dengan mempertajam fokus kelompok sasaran ini, maka yang diharapkan adalah upaya-upaya pemberdayaan masyarakat miskin atau program pembangunan sektor sosial lain yang benar-benar dapat terarah, dan menjangkau lapisan masyarakat yang berada di level paling bawah. Yang harus dieliminasi adalah, bila fokus kelompok sasaran tidak terarah biasanya program akan rawan bias, dan tidak mustahil jatuh kepada orang-orang yang sebenarnya tidak berhak. Selama ini, masing-masing dinas atau instansi biasanya mereka menentukan sendiri-sendiri kelompok mana yang menjadi sasaran prioritas.

Selain pemborosan anggaran karena tiap instansi harus menyediakan tenaga, waktu dan dana sendiri untuk keperluan pendataan awal kelompok sasaran, kecenderungan untuk berjalan sendiri ini

acapkali menyebabkan dampak program menjadi parsial karena sifatnya tidak terpadu. Untuk menghindari ketidakefisienan dan kesamaan fokus kelompok sasaran, tak pelak perlu dipikirkan langkah segera untuk melakukan pendataan kelompok sasaran dengan mempertimbangkan kepentingan berbagai instansi.

Di bidang sosial dapat dipakai hasil pendataan keluarga sejahtera dari BKKBN, namun instrumen pendataan perlu ditambah dengan indikator lain dari segi pendidikan, ketenagakerjaan dan kesehatan. Jadi, kalau dirumuskan, keluarga miskin yang seharusnya diprioritas sebagai kelompok sasaran seyogyanya adalah keluarga Pra-sejahtera alasan ekonomi, terutama mereka yang saat ini menganggur, memiliki anak yang putus sekolah atau anak yang bekerja, dan dari segi kesehatan anggota keluarga miskin tersebut termasuk kategori kurang gizi atau sering sakit. 2). Mendorong pemberdayaan dan pengembangan kegiatan produktif keluarga miskin, khususnya perempuan. Selama ini, kekurangan pokok yang perlu diperhatikan dari berbagai upaya pengentasan masyarakat miskin adalah bahwa mereka menjadi begitu memusatkan perhatian pada peningkatan kuantitas produksi atau hasil kegiatan produktif masyarakat miskin, sehingga kebutuhan sistem produksi mendapat tempat yang lebih utama daripada kebutuhan masyarakat miskin yang lebih substansial. Selama ini, banyak bukti menunjukkan, paket-paket program pengentasan kemiskinan memang lebih banyak berorientasi pada peningkatan produksi daripada bertujuan untuk mendistribusikan kesejahteraan. Paket bantuan permodalan dan bantuan teknologi yang diberikan pemerintah meski dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Namun, sangat kelihatan bahwa di balik itu maksud yang sesungguhnya adalah untuk meningkatkan produksi demi kepentingan ekspor dan peraihan PAD.

Upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin sesungguhnya tidak selalu harus dengan cara memacu perkembangan dan semata hanya berusaha meningkatkan volume atau jumlah produksi sektor usaha kecil tersebut. Sebagai salah satu alternatif dan mungkin juga dapat dilakukan secara bersamaan pola lain yang dapat dilaksanakan untuk mengembangkan usaha kecil adalah dengan cara melakukan

efisiensi proses produksi. Suatu unit kerja sektor industri kecil, misalnya, boleh-boleh saja tetap menjual hasil produksinya dalam jumlah yang sama setiap hari. Namun, yang kemudian harus dipikirkan adalah bagaimana menjadikan unit kerja tersebut dapat memetik keuntungan yang lebih besar dari kondisi sebelumnya? Dalam hal ini, kuncinya adalah efisiensi. Dengan bantuan teknologi produksi, perbaikan manajemen, dan lain-lain, diharapkan proses produksi dapat berlangsung lebih irit dan efisien, sehingga hasil akhir yang diperoleh dapat lebih besar.

Selain itu, untuk meningkatkan kadar keberdayaan keluarga miskin dan sekaligus mencegah resiko kemungkinan terjadinya kegagalan total dari usaha keluarga miskin alangkah baiknya jika di saat yang bersamaan tiap-tiap anggota keluarga yang termasuk tenaga kerja produktif didorong untuk mengembangkan kegiatan usaha yang beranekaragam atau satu dengan yang lain saling berbeda.

Pengalaman yang sudah-sudah membuktikan bahwa sebuah keluarga yang semata-mata hanya menggantungkan kepada satu matapancaharian di mana suami, istri dan anak semua bekerja di sektor yang sama- umumnya secara sosial-ekonomi lebih rapuh karena jika suatu saat harga komoditi yang mereka produksi anjlok, maka itu berarti semua anggota keluarga akan kehilangan dan mengalami kerugian yang sama. Ini berbeda jika dalam sebuah keluarga, masing-masing anggota memiliki matapancaharian yang berbeda-beda. Keluarga yang mengembangkan pola diversifikasi usaha, terbukti dalam kehidupan sehari-hari mereka selalu lebih berdaya dan kenyal terhadap tekanan kebutuhan ekonomi.

Satu hal yang perlu digarisbawahi, bahwa untuk mempercepat pengembangan kegiatan produktif masyarakat miskin, program-program penanggulangan kemiskinan seyogianya tidak hanya terfokus kepada Kepala Keluarga yang dalam hal ini adalah laki-laki, tetapi juga perlu memberi kesempatan seluas-luasnya kepada perempuan untuk terlibat dalam kegiatan produktif secara nyata.

3) Meningkatkan posisi *bargaining* (tawar) dan mengurangi kerentanan keluarga miskin. Artinya, program pembangunan sosial dan upaya penanggulangan kemiskinan seyogianya tidak hanya terjebak pada program yang sifatnya karitatif dan apalagi yang

bersifat punitif, melainkan harus lebih mengedepankan program yang berorientasi pada proses pemberdayaan, yang intinya bersifat *people centered*, *participatory*, *empowering*, dan *sustainable*, dan 4). Meningkatkan peran lembaga lokal dan kelompok sekunder di masyarakat dalam upaya monitoring dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Agar pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan tidak mengalami penyimpangan atau bias di tingkat pelaksanaan, maka prasyarat yang dibutuhkan selain harus ada jaminan bahwa proses pelaksanaan program berjalan secara transparan, yang tak kalah penting adalah harus didukung oleh mekanisme dan sistem kontrol yang kuat, khususnya pelibatan dan kontrol dari masyarakat miskin itu sendiri sebagai kelompok sasaran dan kontrol dari lembaga-lembaga lokal dan kelompok sekunder di masyarakat.

Pengalaman di masa lalu telah banyak mengajarkan bahwa pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan menjadi rawan penyimpangan dana tatkala kontrol dari masyarakat tidak berjalan secara maksimal. Berbagai bantuan modal kegiatan produktif yang dikucurkan, selain tidak tepat sasaran, seringkali juga dimanfaatkan oleh orang tertentu untuk kepentingan pribadi.

## SIMPULAN

Strategi pemberdayaan masyarakat miskin di Kabupaten Sengingi belum menjangkau lapisan masyarakat yang berada di level paling bawah. Hal ini disebabkan tidak adanya koordinasi antara dinas-dinas atau instansi yang terkait dalam menentukan kelompok sasaran program pemberdayaan masyarakat miskin.

Masing-masing menentukan sendiri kelompok mana yang menjadi sasaran prioritas. Strategi pemberdayaan masyarakat miskin dengan bantuan materi ternyata belum efektif. Hal ini disebabkan karena kurangnya pembinaan terhadap penerima bantuan dalam pengelolaan usahanya dan pengawasan dari organisasi pelaksana. Langkah-langkah yang harus ditempuh adalah dengan perubahan peranan organisasi pemerintah dari penentu kebijakan menjadi fasilitator dalam pengelolaan bantuan tersebut dan membentuk koordinasi dengan instansi

yang terkait dalam pola kemitraan, sehingga program pemberdayaan masyarakat miskin betul-betul terfokus pada kelompok sasaran.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Antonius Tarigan, 2003. *Paradigma Baru dalam Pengelolaan Potensi dan Pembangunan Daerah, Suatu Tinjauan Terhadap Perencanaan Pembangunan Wilayah (Kasus : Propinsi Banten dalam Otonomi Daerah)*, Jurnal Bisnis dan Birokrasi, FISIP Universitas Indonesia Vol. XI, No. 1 : 8-10.
- Chambers, Robert, 1987. *Pembangunan Desa, Mulai Dari Belakang*, Jakarta: LP3ES
- Dewanta, Awan Setya (ed.), 1995. *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, Yogyakarta : Aditya Media.
- Hasim As'ari, 2006. *Analisis Efektifitas Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Tenayan Pekanbaru*. Tesis tidak di publikasi., PSIA Pascasarjana Universitas Riau.
- Kantor Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat. 2003. *Sistem Data dan Penentuan Sasaran (Targeting) Dalam Penanggulangan Kemiskinan*.
- Mubyarto & Edy Suandi Hamid, 1986. *Kredit Pedesaan di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.